

Implementasi Kompetisi Inovasi (KOMVAS) Dalam Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin

Maya Floria Yasmin

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia
mayafloriayasmin@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 3 No: 7 Juli 2025
Halaman : 126-137

Abstract

The Regional Innovation Index of Banjarmasin City has never received the title of the most innovative city. In fact, regional innovation is one component of regional competitiveness. The number of regional innovations owned also does not have a high weight as expected. In order to increase the regional innovation index as well as an event to give awards to innovators, Banjarmasin City held an innovation competition (KOMVAS). The purpose of the study was to determine, describe and analyze the implementation of the Innovation Competition (KOMVAS) in increasing the regional innovation index of Banjarmasin City. As well as to determine, describe and analyze the factors that influence the Implementation of the Innovation Competition (KOMVAS) in increasing the regional innovation index of Banjarmasin City. This type of research uses a qualitative approach. The data collection method used interview, observation and documentation techniques with four informants. Data analysis used qualitative data analysis, namely data condensation, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of the study showed that the Implementation of the Innovation Competition (KOMVAS) in Increasing the Regional Innovation Index of Banjarmasin City consisted of regional innovation screening, giving awards at the Banjarmasin City level, reporting regional innovation through SAPIDa, making regulations related to regional innovation and regional innovation coaching clinics. Inhibiting factors include lack of interest in participating in innovation competitions, limited regional budgets, lack of policies related to regional innovation. The supporting factors are the application of the regional innovation reporting analysis system (SAPIDa).

Keywords:

Innovation Competition,
Regional Innovation,
Regional Innovation Index

Abstrak

Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin belum pernah mendapat predikat Kota terinovatif. Padahal inovasi daerah merupakan salah satu komponen daya saing daerah. Jumlah inovasi daerah yang dimiliki juga belum memiliki bobot yang tinggi sesuai harapan. Dalam rangka peningkatan indeks inovasi daerah sekaligus sebagai ajang untuk memberikan penghargaan bagi inovator, Kota Banjarmasin mengadakan kompetisi inovasi (KOMVAS). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisa implementasi Kompetisi Inovasi (KOMVAS) dalam meningkatkan indeks inovasi daerah Kota Banjarmasin. Serta untuk mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kompetisi Inovasi (KOMVAS) dalam meningkatkan indeks inovasi daerah Kota Banjarmasin. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan empat informan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yaitu kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kompetisi Inovasi (KOMVAS) Dalam Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin terdiri dari penjangkaran inovasi daerah, memberikan penghargaan pada tingkat Kota Banjarmasin, pelaporan inovasi daerah melalui SAPIDa, membuat regulasi terkait inovasi daerah dan *coaching clinic* inovasi daerah. Faktor penghambat yaitu kurangnya minat dalam mengikuti kompetisi inovasi, keterbatasan anggaran daerah, kurangnya kebijakan terkait inovasi daerah. Adapun faktor pendukung yaitu adanya aplikasi sistem analisis pelaporan inovasi daerah (SAPIDa).

Kata Kunci: Kompetisi Inovasi, Inovasi Daerah, Indeks Inovasi Daerah

PENDAHULUAN

Penelitian berikut berangkat dari isu bahwasannya pemerintah Kota Banjarmasin sejak tahun 2018 hingga 2023 belum pernah meraih predikat Kota Terinovatif pada ajang *Innovative Government Awards* (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Padahal, Kota Banjarmasin selalu berpartisipasi pada IGA sejak pertama kali acara tersebut digelar. Selain itu, total inovasi yang diajukan ke IGA di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indeks Inovasi Daerah menjadi satu diantara tolak ukur yang memperlihatkan daya saing sebuah daerah. Terlebih, Kota Banjarmasin ialah satu diantara kota penyangga Ibu Kota Nusantara, sehingga inovasi yang ada di kota berikut wajib bisa memperlihatkan kualitas yang baik.

Sebagai kota dengan total penduduk terbanyak di Kalimantan Selatan, tuntutan masyarakat akan pelayanan publik pun terus meningkat. Kualitas pelayanan publik akan semakin baik jika ASN selaku tenaga kerja di pemerintahan mempunyai kompetensi serta terus bekerja untuk berinovasi. Guna mengembangkan kapasitas aparatur inovasi yang andal serta berkualitas, satu diantara langkah yang perlu diambil ialah menyajikan penghargaan (*reward*). Fatoni (2022) memberi pernyataan bahwasanya kompetisi inovasi mempunyai peranan krusial dalam menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan penghargaan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah bisa menerapkan kompetisi inovasi agar semakin banyak inovasi yang muncul dari berbagai pihak.

Tabel 1. Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019-2023

Tahun	Skor	Peringkat IGA	Kategori
2019	1320	156	Kurang Inovatif
2020	1359	28	Sangat Inovatif
2021	37,85	61	Inovatif
2022	58,55	20	Inovatif
2023	60,72	21	Sangat Inovatif

Sumber : diolah peneliti (2025)

Pada tabel tersebut dijelaskan bahwasannya pada penilaian IGA yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kota Banjarmasin mempunyai Skor Indeks Inovasi sebesar 1,359 di tahun 2020 (sangat inovatif). Namun, di tahun 2021, skor tersebut turun menjadi 37,85 (inovatif). Di tahun 2022, skor Indeks meningkat menjadi 58,55 (inovatif). Selanjutnya di tahun 2023, skor kembali naik menjadi 60,72 (sangat inovatif). Sejak pelaksanaan IGA dimulai di tahun 2017, Kota Banjarmasin belum pernah memperoleh IGA Awards untuk kategori Kota Terinovatif. Untuk bisa memperoleh kategori kota terinovatif, Kota Banjarmasin wajib masuk peringkat sepuluh besar.

Pelaksanaan KOMVAS mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 terkait Penilaian serta Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. KOMVAS yang sudah berlangsung sejak tahun 2021, bertujuan guna menyajikan apresiasi kepada para pelaku inovasi baik dengan cara individu maupun kelompok yang sudah berhasil melangsungkan serta mengembangkan inovasi yang nyata serta sudah diterapkan serta terbukti bermanfaat. Tujuan penyelenggaraan KOMVAS ialah guna menumbuhkan kesadaran masyarakat pada budaya inovatif serta membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan di Kota Banjarmasin. Hal berikut sejalan dengan pendapat Septiana (2020) bahwasannya kompetisi inovasi selaku *crowdsourcing* ialah cara yang efektif guna mengumpulkan banyak ide pada waktu singkat. Melalui KOMVAS, peserta dari berbagai kalangan akan mengajukan proposal serta indikator inovasi daerah pada Sistem Pelaporan Inovasi Daerah (<http://sapida.banjarmasinikota.go.id>) sekaligus berkontribusi dalam mengoptimalkan indeks inovasi daerah Kota Banjarmasin. Sebab satu diantara indikator pengukuran untuk Indeks Inovasi Daerah ialah total inovasi yang ada di tiap daerah.

METODE

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pemilihan sumber data dilaksanakan dengan metode purposive serta snowball, sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara triangulasi, serta analisis datanya bersifat induktif/kualitatif, dengan hasil penelitian kualitatif yang lebih fokus pada makna daripada pada generalisasi.

Peneliti berusaha guna menggambarkan serta menjelaskan bagaimana realitas di lapangan terkait strategi pengoptimalan indeks inovasi daerah melalui implementasi program kompetisi inovasi (KOMVAS). Hal berikut dikaji serta dihubungkan dengan teori-teori yang mendukung penelitian tersebut, sehingga bisa ditemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat pada studi tersebut.

Penentuan lokasi penelitian dilaksanakan dengan cara purposive. Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian ialah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) Kota Banjarmasin yang berlokasi di JL. RE Martadinata Blok C Lantai 2 serta 3 Kota Banjarmasin. Alasan dipilihnya Badan Perencanaan Daerah, Penelitian serta Pengembangan Kota Banjarmasin selaku tempat penelitian, ada beberapa pertimbangan, yakni sebab Badan Perencanaan Daerah, Penelitian serta Pengembangan ialah instansi yang membina inovasi daerah di Kota Banjarmasin selaras dengan satu diantara fungsinya yakni penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan serta pengendalian bidang inovasi serta teknologi. Alasan kedua yakni Badan Perencanaan Daerah, Penelitian serta Pengembangan Kota Banjarmasin menyelenggarakan Kompetisi Inovasi selaku satu diantara program guna menjangkau inovasi daerah.

Teknik pengumpulan data ataupun informasi yang diperlukan pada penelitian ini yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. . Sumber pengetahuan yang diwawancarai pada penelitian ini ialah :

1. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
3. Fungsional di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
4. Staf Pelaksana pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terbagi menjadi tiga bagian: kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta verifikasi. Kondensasi data ialah proses dimana peneliti memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan/atau mengubah data yang terdapat pada kumpulan catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, serta bukti empiris lainnya. Penyajian data bisa dilaksanakan dengan beberapa teknis selaras dengan data yang didapat dari lapangan. Diantaranya a) mengubah data suara hasil wawancara menjadi data tertulis. Kemudian b) deksripsi data yakni penyajian data dengan penjelasan yang bersifat menggambarkan hakikat kenyataan di lapangan. c) analisis naratif yakni proses penyampaian data berupa cerita, ataupun penyatuan potongan-potongan data menjadi sebuah krnologi yang tersusun dengan cara rapi. Penarikan kesimpulan ialah langkah terakhir yang dilaksanakan peneliti. Kesimpulan baru bisa diperoleh ketika seluruh data sudah terkumpul serta semua proses analisis data baik reduksi maupun penyajian data sudah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah (KOMVAS)****a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam memastikan kelancaran kompetisi. Pada tahap ini, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan serangkaian rapat koordinasi, baik internal maupun eksternal serta menyiapkan hal lain yang bersifat administratif dan teknis. Rapat eksternal dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait seperti Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Riset Inovasi Nasional. Rapat-rapat dilakukan untuk mengevaluasi

pelaksanaan tahun sebelumnya dan menyesuaikan sistem pelaksanaan dengan kondisi terkini.

b. Tahap Pendaftaran

Tahap pendaftaran merupakan langkah awal bagi peserta untuk mengikuti kompetisi. Proses ini dikelola sepenuhnya oleh Bidang Litbang, mulai dari pembukaan pendaftaran, verifikasi berkas administrasi, hingga teknis meeting. Pendaftaran KOMVAS dilakukan melalui Sistem Pelaporan dan Analisis Inovasi Daerah (SAPIDa).

c. Tahap Penilaian

Tahap penilaian dilakukan dalam dua tahap utama yaitu penilaian administratif meliputi verifikasi kelengkapan dokumen dan kesesuaian dengan syarat yang telah ditetapkan, penilaian proposal dan presentasi inovasi. Setelah berkas peserta lolos seleksi administratif, inovasi mereka dinilai oleh dewan juri independen. Tim Dewan Juri Kegiatan KOMVAS yang ditetapkan oleh Wali Kota Banjarmasin. Tim Dewan juri adalah beberapa orang dari golongan akademisi, praktisi, mitra Pembangunan yang memiliki reputasi dalam pemikiran dan pengalaman mendorong upaya peningkatan inovasi daerah untuk bertugas menilai dan mengakurasi naskah inovasi seluruh peserta sesuai tema lomba. Adapun tim dewan juri yang dipilih pada tahun 2024 berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Riset Inovasi Nasional, Badan Riset Inovasi Daerah, TVRI, Universitas Lambung Mangkurat, Bank Kalsel.

d. Tahap Penghargaan

Tahap akhir dari KOMVAS adalah penghargaan yang diberikan kepada inovator terbaik. Pemilihan pemenang dilakukan berdasarkan kesepakatan juri dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Biasanya, penghargaan diberikan pada akhir tahun sebagai bentuk apresiasi kepada para inovator yang telah berkontribusi. Tahap penghargaan merupakan momen puncak dalam pelaksanaan KOMVAS. Pemenang diumumkan dalam acara resmi yang dihadiri oleh Wali Kota Banjarmasin. Penghargaan diserahkan langsung oleh wali kota, karena ini merupakan apresiasi dari pemerintah daerah kepada innovator.

Implementasi Kompetisi Inovasi (KOMVAS)

Indeks Inovasi Daerah ialah himpunan Inovasi Daerah oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada situs IGA (<https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>) milik Kementerian Dalam Negeri. Tiap daerah berlomba guna mendapatkan indeks tertinggi. Pada daerah dengan skor tertinggi akan mendapat predikat terinovatif serta diusulkan ke Kementerian Keuangan guna mendapat Dana Insentif Daerah (DID) yang totalnya bervariasi tiap tahun.

Satu diantara program kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin yakni mengoptimalkan kapasitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator kategori Indeks Inovasi Daerah.

Semenjak KOMVAS dilaksanakan di tahun 2021, terlihat adanya kenaikan pada Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin. Di tahun 2021 serta 2022, kota Banjarmasin berhasil mencatatkan status inovatif, yang menandakan adanya pengoptimalan total serta kualitas inovasi yang terjadi. Di tahun 2023, kota Banjarmasin bahkan berhasil meraih status sangat inovatif, yang memperlihatkan bahwasannya upaya guna mendorong inovasi baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor lain mulai membuahkan hasil yang lebih optimal. Namun, yang perlu menjadi perhatian ialah penurunan IGA yang terjadi di tahun 2024, kembali menjadi inovatif.

Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 selaras SK Kemendagri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 ialah sebesar 58,61 (Inovatif), sedangkan untuk tahun 2023 selaras SK Kemendagri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 ialah sebesar 60,72 (Sangat Inovatif).

Dari wawancara, tujuan utama dari pelaksanaan KOMVAS ialah guna menjangkau serta mengembangkan inovasi di Kota Banjarmasin, sekaligus membentuk budaya inovasi yang berkelanjutan. Harapannya, pelaporan IGA menjadi lebih alami serta tak terkesan dipaksakan. Sebelumnya, Kota Banjarmasin tak mempunyai wadah yang jelas guna menampung ide serta inovasi, yang menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan inovasi yang terukur serta terorganisir. KOMVAS

dianggap selaku sarana guna mempermudah hal tersebut, serta memperkenalkan serta memperkuat budaya inovasi di masyarakat.

Dalam wawancara dengan JF Peneliti, disebutkan bahwasannya KOMVAS menyajikan penghargaan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang memicu munculnya jiwa kompetitif antar SKPD. Dengan adanya penghargaan, masing-masing SKPD terdorong guna mewujudkan inovasi serta memperbaiki indikator penilaiannya. Hal berikut diharapkan bisa memudahkan pada proses evaluasi serta pencapaian yang lebih baik di tingkat pemerintahan. KOMVAS berfungsi tak hanya selaku kompetisi antar SKPD, tetapi juga selaku alat guna memperbaiki kualitas inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Kepala Bidang Litbang menambahkan bahwasannya satu diantara dampak yang sangat terlihat dari KOMVAS ialah kemampuannya dalam membantu pengukuran Indeks Inovasi Daerah, yang diukur oleh Kementerian pada Negeri. selaku kompetisi yang mengapresiasi inovator dari berbagai sektor, KOMVAS berfungsi selaku alat ukur yang jelas serta konkret dalam mengoptimalkan Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin. Meskipun indeks Indeks Inovasi Daerah kota berikut mengalami penurunan tahun berikut, upaya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian serta Pengembangan dengan adanya KOMVAS memperlihatkan hasil yang lebih jelas dari segi kuantitas serta kualitas inovasi yang terlibat. Menurut Kabid Litbang, penurunan berikut berbanding terbalik dengan usaha yang sudah dilaksanakan oleh pegawai di Bidang Litbang.

Melalui wawancara, disampaikan bahwasannya satu diantara cara terbaik guna melihat pengoptimalan indeks inovasi ialah lewat KOMVAS. Dari data yang dihasilkan, baik dengan cara kualitatif (melihat jenis inovasi) maupun kuantitatif (total partisipasi serta inovasi), pihak pemerintah bisa menilai sejauh mana inovasi berkembang di Banjarmasin. Walaupun pada penjabaran indeks inovasi daerah pada spider map di tahun 2024, Kota Banjarmasin terdapat kelemahan pada total inovasi serta hasil kreatif. Hal berikut memperlihatkan Kota Banjarmasin wajib lebih berperan aktif dalam menjalankan kewenangannya selaras Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 terkait Inovasi Daerah.

Aspek Penilaian



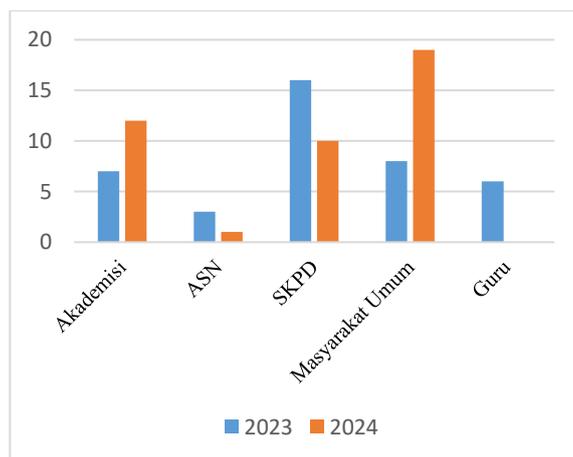
Gambar 1. Spider Web Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024

Sumber : Website IGA <https://indeks.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/v2/>

1. Penjaringan Inovasi Daerah

Di tahun 2024 total inovasi yang berhasil dijaring sebanyak 37 inovasi. Namun inovasi yang berasal dari ASN serta SKPD yang didanai oleh APBD totalnya masih sedikit yakni sebesar 11 inovasi dari SKPD serta 1 inovasi dari ASN. Total inovasi daerah berikut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dimana KOMVAS berhasil menjaring 42 inovasi yang terdiri dari 16 inovasi dari SKPD serta 5 inovasi dari ASN. Sebanyak 21 inovasi lainnya berasal dari akademisi serta masyarakat umum. Walaupun berhasil menjaring inovasi dari segi kuantitas namun kualitas inovasi yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan. Dari 37 inovasi yang

berhasil dijaring pada KOMVAS, bisa dilihat pada SAPIDA bahwasannya hanya 2 inovasi yang mempunyai bobot diatas 100 yakni Parak Acil Online serta SIP Kawan



Gambar 2. Perbandingan Total Peserta KOMVAS Tahun 2023-2024
Sumber : Data diolah peneliti, 2025

2. Memberikan Penghargaan Pada Tingkat Kota Banjarmasin



Gambar 3. Penyerahan Penghargaan Kompetisi Inovasi Kota Banjarmasin

KOMVAS selaku sebuah program pemberian penghargaan yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin. Berlandaskan struktur organisasi, program berikut menindaklanjuti dari peraturan Kementerian pada Negeri bahwasannya tiap daerah seharusnya menyajikan penghargaan kepada tiap inovator didaerahnya, selanjutnya dijalankan menjadi sebuah program wajib guna mengoptimalkan inovasi daerah di Banjarmasin. Program berikut dijalankan oleh Bidang Litbang yang berperan selaku mediator, fasilitator, administrator serta pembuat kebijakan. Namun di tahun 2024 lalu program berikut sempat akan mengalami refofusing, yakni pengurangan anggaran sebab dianggap bukan program prioritas. Anggaran aktivitas yang semula bertotal Rp. 439.831.500,-, berkurang menjadi Rp. 230.024.400.- Tempat pemberian penghargaan juga tak lagi disajikan di hotel pada malam penganugerahan, namun dilaksanakan di Aula Kayuh Baimbai Kota Banjarmasin sebab pengurangan anggaran tersebut.

3. Pelaporan Inovasi Daerah lewat SAPIDA

Sejak tahun 2023, pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah (KOMVAS) sudah memakai sistem digital berupa Sistem Analisa Pelaporan Inovasi Daerah (SAPIDA) yang bisa diakses lewat <https://sapida.banjarmasinkota.go.id//>. SAPIDA ialah sistem berbasis web yang mencakup jaringan informasi serta dokumentasi pada rangka memfasilitasi pelaporan serta analisis inovasi daerah di Banjarmasin. SAPIDA ialah hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin guna memudahkan organisasi perangkat daerah menginput inovasi daerah. Hal berikut berbeda dibandingkan pelaksanaan KOMVAS di tahun 2021 serta 2022 yang masih berupa penginputan proposal dengan cara manual memakai *google form* serta *email*. Dengan adanya SAPIDa, dokumentasi pelaporan lebih mudah untuk dilihat serta bisa dipakai oleh perangkat daerah lain yang menjadi *leading sector* inovasi pelayanan publik yakni Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku kompetisi inovasi ditingkat lain yakni Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB.

Melalui SAPIDa juga lebih mudah guna melihat inovasi daerah yang diikutkan pada KOMVAS sebab pada sistem tersebut terdapat data berupa nama inovasi, inovator, bobot, usia inovasi, kontak person yang bisa dihubungi, serta semua pengumuman terkait KOMVAS. Pada sisi pihak penyelenggara, dengan adanya penginputan proposal serta indikator inovasi lewat sistem berikut juga memudahkan sebab rekam jejak inovasi daerah yang mengikuti KOMVAS bisa terdokumentasi dengan baik.

4. Membuat Regulasi Inovasi Daerah

Regulasi yang melakukan pengaturan KOMVAS masih sebatas edaran pelaksanaan serta keputusan Wali Kota Banjarmasin terkait tim dewan juri KOMVAS. Belum ada regulasi spesifik yang melakukan pengaturan penyelenggaraan KOMVAS dengan cara menyeluruh. Sampai saat ini, regulasi formal seperti Peraturan Daerah (Perda) ataupun Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengikat aktivitas berikut masih pada tahap pembahasan. Meskipun sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) internal, dokumen tersebut belum dipublikasikan dengan cara luas kepada calon peserta, sehingga menyulitkan mereka dalam memahami prosedur serta persyaratan yang wajib dipenuhi. Ketiadaan regulasi yang jelas juga menyebabkan pelaksanaan aktivitas berikut belum sepenuhnya melembaga, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi pada pelaksanaan dari tahun ke tahun.

5. Coaching Clinic Inovasi Daerah

Melalui Klinik Inovasi Daerah (KLINNODA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Banjarmasin menyelenggarakan Klinik Pembinaan Inovasi Daerah Kota Banjarmasin untuk memberikan pemahaman serta tata cara Pelaporan Inovasi Daerah Kota Banjarmasin kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, mengenai tata cara Pelaporan Inovasi Daerah Kota Banjarmasin yang dilaksanakan setiap tahun.

Penemuan Penelitian

Implementasi kebijakan publik ialah langkah krusial pada proses kebijakan, yang mempengaruhi sejauh mana tujuan dari kebijakan itu bisa tercapai. Berlandaskan teori implementasi kebijakan Edwards III (Laary, dkk, 2022), keberhasilan sebuah program sangat dipengaruhi oleh empat elemen penting: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi. pada konteks KOMVAS, komunikasi yang baik antara penyelenggara serta peserta menjadi faktor utama guna memastikan kelancaran program berikut, sementara dukungan sumber daya serta kebijakan yang memadai akan berpengaruh pada sejauh mana inovasi yang dihasilkan bisa diterapkan dengan cara lebih luas.

Kompetisi Inovasi (KOMVAS) seharusnya mempunyai peran strategis dalam mengoptimalkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Banjarmasin, sebab lewat program berikut, pemerintah daerah bisa mengidentifikasi serta mengakomodasi berbagai inovasi yang berpotensi mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah, tak hanya dari segi total inovasi tetapi juga dari segi kualitas. Indeks Inovasi Daerah, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri pada Negeri Nomor 104 Tahun 2018, ialah instrumen pengukuran yang menilai sejauh mana sebuah daerah mampu menghasilkan inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta sektor lainnya. Berlandaskan Septiana (2020), kompetisi bisa dipakai selaku *crowdsourcing* guna mengumpulkan inovasi, hal berikut sejalan dengan penilaian indeks inovasi daerah dimana satu diantara indikator perhitungannya yakni total

inovasi yang ada serta tingkat kematangan inovasi tersebut.

Berlandaskan teori *Diffusion of Innovation* (Suryafma et al., 2023), inovasi daerah akan lebih efektif diadopsi apabila ada mekanisme kompetisi yang bisa memotivasi individu ataupun institusi untuk berinovasi. KOMVAS, selaku wadah bagi ASN, akademisi, serta masyarakat umum, berkontribusi dalam mewujudkan ekosistem inovasi yang berkelanjutan serta terstruktur, sehingga berpeluang mengoptimalkan peringkat IID Kota Banjarmasin dengan cara nasional.

Meskipun KOMVAS sudah berkontribusi dalam mengoptimalkan total inovasi yang dihasilkan, efektivitasnya dalam menaikkan Indeks Inovasi Daerah masih menghadapi beberapa tantangan. Berlandaskan Model Implementasi Kebijakan Van Meter serta Van Horn (Fauziyah & Arif, 2021), efektivitas kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk sumber daya yang tersedia, karakteristik organisasi pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial serta politik. Selain itu, belum adanya mekanisme evaluasi yang komprehensif kepada inovasi yang dihasilkan dari kompetisi berikut menyebabkan kurangnya inovasi yang benar-benar diterapkan pada kebijakan daerah. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya meskipun KOMVAS berhasil mendorong penciptaan inovasi, penerapan serta kesinambungan inovasi tersebut masih memerlukan strategi lebih lanjut guna memastikan dampaknya kepada pengoptimalan IID yang lebih signifikan.

Komunikasi ialah faktor kunci pada implementasi kebijakan sebab menentukan pemahaman serta konsistensi dalam menjalankan kebijakan. pada pelaksanaan KOMVAS, komunikasi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian serta Pengembangan mencakup pelaksanaan *coaching clinic* pendampingan inovasi daerah, sosialisasi inovasi daerah, pemberitahuan adanya kompetisi lewat berbagai media, baik digital (Instagram, WhatsApp, Facebook) maupun konvensional (baliho, pamflet, surat resmi).

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), kemungkinan keberhasilan implementasi bergantung pada seberapa baik tujuan serta ukuran dikomunikasikan, serta seberapa akurat serta konsisten penyampaiannya. Kesalahan dianggap sangat tidak mungkin terjadi jika ada komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses implementasi. Sebaliknya, berikut ini juga benar.

Satu diantara kendala utama pada komunikasi ialah efektivitas penyebaran informasi yang tak merata. Meskipun sudah dilaksanakan sosialisasi lewat berbagai saluran, banyak peserta yang masih merasa kebingungan dalam memahami mekanisme pendaftaran, penyusunan proposal, serta indikator penilaian. Beberapa calon peserta dari masyarakat umum serta ASN kesulitan dalam menafsirkan pengisian indikator inovasi daerah, yang menyebabkan kurangnya total pendaftar.

Selain itu, waktu sosialisasi yang terbatas juga menjadi kendala dalam memastikan seluruh informasi bisa tersampaikan dengan baik. Beberapa SKPD tak mempunyai kesiapan dalam mengembangkan inovasi sebab merasa tak mempunyai cukup waktu guna memahami persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi. Guna mengatasi hal berikut, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian serta Pengembangan mencoba memperpanjang periode pendaftaran serta menyajikan *coaching clinic* bagi calon peserta, utamanya dari kalangan ASN serta SKPD.

Dari aspek koordinasi internal, komunikasi antara Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dengan dewan juri serta pemangku kepentingan lainnya sudah dilaksanakan lewat serangkaian rapat serta diskusi. Rapat koordinasi dilaksanakan beberapa kali, baik dengan cara internal maupun dengan para dewan juri yang berasal dari berbagai sektor, seperti akademisi, pemerintah pusat, serta sektor swasta. Namun, meskipun koordinasi berikut sudah berjalan, masih terdapat beberapa kendala pada komunikasi teknis antara pelaksana kebijakan dengan peserta. Informasi yang diterima dari satu sumber kadang berbeda dengan sumber lainnya, menyebabkan kebingungan dalam memahami persyaratan kompetisi. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya masih ada ketidakkonsistenan pada penyampaian informasi yang perlu diperbaiki agar kebijakan berikut bisa berjalan lebih efektif di masa mendatang.

Keberhasilan pada implementasi kebijakan bergantung pada seberapa baik sumber daya utama bisa dimanfaatkan guna meraih hasil yang diinginkan (Edwards III pada Laary, dkk, 2022). Beberapa tahap pada proses implementasi memerlukan tenaga kerja yang berkualitas selaras dengan tuntutan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan yang sudah disetujui dengan cara politik. Namun, jika

kemampuan serta keahlian dari sumber daya tersebut tak ada, maka sulit untuk berharap pada kinerja kebijakan publik yang memuaskan.

Sumber daya memainkan peran yang sangat penting pada implementasi kebijakan. Berlandaskan Edward III yang dikutip oleh Winarno (2012), sumber daya ialah unsur yang krusial dalam menjalankan kebijakan publik. Meskipun perintah pelaksanaan bisa disampaikan dengan teliti, jelas, serta konsisten, bila pelaksana tak mempunyai sumber yang cukup guna menerapkan kebijakan, maka pelaksanaan tersebut kemungkinan besar tak akan efektif. Sumber daya dibagi menjadi empat kategori, yakni tenaga kerja, informasi, otoritas, serta sarana yang diperlukan guna menerapkan ide-ide yang ada di atas kertas dalam menyediakan layanan publik.

Implementasi KOMVAS memakai sumber daya yang mencakup anggaran, SDM, serta fasilitas berupa infrastruktur teknologi. Tahun 2024, anggaran mengalami pengurangan yang berdampak pada publikasi, sosialisasi serta pelaksanaan program. Guna mengatasi keterbatasan anggaran, perlu dilaksanakan upaya diversifikasi sumber pendanaan, termasuk menggandeng sektor swasta lewat program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sumber daya berupa sarana serta prasarana yang dipakai pada pelaksanaan KOMVAS juga memainkan peran penting dalam mendukung jalannya kompetisi. Sistem administrasi berbasis digital, seperti pemakaian aplikasi SAPiDa, sudah diterapkan guna memudahkan proses pendaftaran serta penilaian. Namun, masih terdapat beberapa kendala teknis pada implementasi sistem berikut, utamanya pada hal aksesibilitas bagi peserta yang kurang familiar dengan teknologi digital. Selain itu, pemanfaatan platform digital pada berbagai prosedur pelaksanaan seharusnya bisa menjadi solusi untuk efisiensi anggaran, seperti pemakaian sistem daring pada bimbingan teknis serta sosialisasi.

Dalam aspek sumber daya manusia, pelaksanaan KOMVAS melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab kepada perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi aktivitas. Meskipun dengan cara umum total SDM yang terlibat dianggap cukup, namun beban kerja yang tinggi serta keterbatasan tenaga ahli pada bidang inovasi menjadi tantangan tersendiri. Seiring dengan hal tersebut, juga terdapat kendala dalam memotivasi inovator dari ASN serta SKPD untuk berpartisipasi aktif. Sebagian inovator diperangkat daerah belum terbiasa mendokumentasikan inovasi pada bentuk video serta data dukung yang diminta cukup banyak. Dengan demikian, kompetensi pada hal digitalisasi wajib dikuasai oleh SDM yang ada pada masyarakat serta Pemerintah Kota Banjarmasin.

Sikap pelaksana kebijakan mempunyai dampak besar dalam mengimplementasikan kebijakan dengan cara efektif. Tingkat kecenderungan pelaksana kepada standar utama serta sasaran juga menjadi hal yang sangat krusial. Para pelaksana bisa saja tak berhasil dalam menerapkan kebijakan dengan benar sebab mereka menolak sasaran-sasaran yang ada pada kebijakan itu. Sebaliknya pun demikian.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwasannya tiap elemen pada pelaksanaan kebijakan perlu lewat penilaian dari para pelaksana di wilayah hukum tempat kebijakan itu dibuat. Terdapat tiga aspek dari reaksi pelaksana yang bisa berpengaruh kepada motivasi serta kemampuan mereka dalam melangsungkan kebijakan, yakni: pemahaman (kognisi) terkait kebijakan tersebut, jenis reaksi terhadapnya (menerima, netral, menolak) serta sejauh mana reaksi itu terjadi.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwasannya para pelaksana di Bidang Litbang mempunyai komitmen kuat kepada inovasi daerah utamanya pelaksanaan KOMVAS. Seluruh narasumber memberi pernyataan bahwasannya KOMVAS sangat penting. Sayangnya, sikap pelaksana berikut masih belum bisa membawa indeks inovasi daerah Kota Banjarmasin meraih predikat terinovatif. Padahal penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Deru dkk (2023) memperlihatkan terdapat pengaruh sikap pelaksana kepada indeks inovasi daerah Provinsi Sumatera Selatan yang membawa provinsi berikut meraih indeks inovasi daerah tertinggi di Indonesia. Hal berikut sebab perilaku pelaksana serta koordinator Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan sangat bertanggung jawab, kreatif, serta inovatif.

Berlandaskan Edward III pada Widodo (2010), implementasi kebijakan mungkin belum berjalan dengan baik akibat adanya ketidakefisienan pada struktur birokrasi. Edward III pada Winarno (2014) juga mencatat bahwasannya ada dua fitur penting dari struktur birokrasi, yakni prosedur kerja yang ialah ukuran-ukuran dasar ataupun yang sering disebut selaku Standar Operasional Prosedur (SOP) serta adanya fragmentasi. SOP berfungsi selaku acuan bagi tiap pelaksana dalam melangsungkan

tindakan.

Struktur birokrasi yang efektif diperlukan guna memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan lancar. Pada pelaksanaan KOMVAS, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian serta Pengembangan sudah melakukan penyusunan SOP serta regulasi pada bentuk Keputusan Wali Kota. Namun, regulasi yang lebih kuat seperti Peraturan Wali Kota, masih belum ada. Hal berikut menyebabkan kurangnya ketegasan dalam mewajibkan partisipasi SKPD, serta minimnya sanksi bagi unit kerja yang tak berkontribusi pada inovasi daerah.

Dalam aspek koordinasi antar instansi, implementasi KOMVAS masih menghadapi tantangan dalam membangun keterlibatan aktif dari berbagai SKPD. Beberapa SKPD masih kurang antusias dalam mengembangkan inovasi sebab tak adanya mekanisme insentif yang jelas. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan regulasi serta dukungan lebih konkret dari pimpinan daerah guna memastikan keberlanjutan serta efektivitas implementasi kebijakan berikut.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin selaku organisasi pelaksana mempunyai peran utama dalam melakukan penyusunan konsep, melangsungkan sosialisasi, serta mengkoordinasikan penilaian serta penghargaan. Dengan adanya sistem digital SAPIDA, proses administrasi serta pemantauan inovasi menjadi lebih efektif. Namun, regulasi terkait pelaksanaan KOMVAS masih terbatas pada Keputusan Wali Kota tanpa adanya peraturan yang lebih mengikat seperti Peraturan Wali Kota yang berpotensi memperkuat pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor serta kesinambungan kebijakan dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, penyusunan regulasi yang lebih kuat, seperti Peraturan Wali Kota bahkan Peraturan Daerah sangat diperlukan guna memperkuat dasar hukum serta menjamin keberlanjutan program berikut.

Dalam implementasi kebijakan yang berlandaskan Teori Van Meter dan Van Horn, satu diantara aspek penting pada proses tersebut ialah adanya tujuan serta standar yang jelas. Berlandaskan teori berikut, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan yang diterapkan bisa diukur dari tujuan serta proses kelahiran kebijakan tersebut. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan bisa dinilai berlandaskan sejauh mana tujuan yang sudah ditetapkan bisa tercapai. Sebuah kebijakan bisa dinyatakan berhasil jika terdapat keselarasan antara tujuan serta pelaksanaan kebijakan tersebut. (Anggara, 2014).

KOMVAS bertujuan guna mengoptimalkan budaya inovasi di lingkungan SKPD, ASN, akademisi, serta masyarakat. Standar keberhasilannya ditentukan lewat indikator total peserta, kualitas inovasi yang dihasilkan, serta dampaknya kepada pengoptimalan Indeks Inovasi Daerah (IID). Namun, pencapaian standar berikut masih menghadapi kendala seperti minimnya partisipasi dari ASN serta kurangnya tindak lanjut dari kepala daerah guna memastikan keterlibatan aktif SKPD pada inovasi.

Faktor Penghambat Implementasi KOMVAS dalam Mengoptimalkan Indeks Inovasi Daerah

1. Kurangnya Minat dalam mengikuti Kompetisi Inovasi

Pada penelitian ini, para ASN beralasan adanya kesibukan serta keterbatasan waktu menjadi tantangan bagi mereka untuk fokus pada inovasi. Kepala Bidang Penelitian serta Pengembangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian serta Pengembangan mengungkapkan bahwasannya meskipun OPD sudah diwajibkan guna menghasilkan inovasi tiap tahunnya, masih terdapat resistensi pada penerapan budaya inovasi di kalangan ASN. Hal berikut sejalan dengan teori Grindle terkait implementasi kebijakan, yang menekankan bahwasannya kesiapan institusi dalam menerima perubahan serta dukungan dari pemangku kebijakan sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya lebih lanjut guna mengoptimalkan motivasi serta kapasitas inovasi di tingkat OPD, termasuk dengan menyajikan insentif yang lebih jelas bagi inovator serta memastikan keberlanjutan inovasi yang dihasilkan lewat KOMVAS.

2. Keterbatasan Anggaran Daerah

Berdasarkan Warwick (dalam Tjilen, 2019), kompleksitas yang ada pada program itu sendiri menjadi satu diantara penyebab terhambatnya penerapan kebijakan (kondisi yang menghambat). sebuah program bisa menghadapi masalah pada pelaksanaannya sebab karakter dasar dari program

tersebut. Kendala yang ada disebabkan oleh beberapa hal, seperti faktor teknis, ekonomi, serta perilaku dari pelaksana serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa diidentifikasi bahwasannya yang menjadi kendala ialah kompleksitas yang terkait dengan program itu sendiri, seperti faktor ekonomi. Faktor ekonomi pada sebuah kebijakan program mempunyai dampak yang signifikan, baik selaku pendorong maupun penghalang. Pada program KOMVAS, faktor ekonomi berfungsi selaku penghalang, di mana anggaran mengalami pengalihan ataupun pemotongan. Mereka beranggapan bahwasannya minimnya anggaran dana menyebabkan keterbatasan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan guna menyalurkan serta merealisasikan program tersebut.

3. Kurangnya Kebijakan Terkait Inovasi Daerah

Kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah akan mendorong munculnya berbagai inovasi baru di daerah. Satu diantara cara guna mewujudkan kebijakan berikut ialah dengan mengharuskan tiap instansi daerah guna melangsungkan inovasi. Pada tahap berikut, kebijakan tersebut diikuti oleh komitmen kinerja dari pegawai yang ada (Fatoni, 2022). Pemerintah Kota Banjarmasin sudah menerbitkan edaran one agency two innovations. Selain itu, ada juga edaran terkait penginputan proposal inovasi di SAPiDa serta edaran untuk berpartisipasi pada KOMVAS. Namun, sayangnya kebijakan berikut belum dilaksanakan dengan cara menyeluruh.

4. Kurangnya Pemahaman Inovator terhadap Kompetisi Inovasi Daerah (KOMVAS)

Satu diantara faktor penghambat pada implementasi Kompetisi Inovasi (KOMVAS) ialah pemahaman peserta kepada konsep inovasi serta mekanisme kompetisi. Banyak peserta, utamanya dari kalangan masyarakat umum serta ASN, masih mempunyai pemahaman yang terbatas terkait kriteria inovasi yang selaras dengan standar penilaian. Hal berikut sejalan dengan teori Diffusion of Innovation (Suryafma et al., 2023), yang menyebutkan bahwasannya adopsi inovasi bergantung pada pemahaman individu kepada manfaat serta cara penerapannya. Kurangnya literasi inovasi berikut menyebabkan beberapa peserta kesulitan dalam melakukan penyusunan proposal inovasi yang sistematis, menginput data lewat platform digital, serta menjelaskan dampak inovasi mereka pada tahap presentasi. Oleh sebab itu, diperlukan pendampingan teknis serta sosialisasi yang lebih intensif agar peserta bisa memahami dengan jelas konsep inovasi yang diharapkan serta cara mengikuti kompetisi dengan cara efektif.

Faktor Pendukung Implementasi KOMVAS dalam Mengoptimalkan Indeks Inovasi Daerah Adanya Aplikasi Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPiDa)

Pada zaman digital saat ini, dengan adanya revolusi industri 4. 0, kebutuhan akan efisiensi pada pemerintahan bisa dipenuhi lewat teknologi informasi serta komunikasi yang menawarkan kecepatan pada penyampaian informasi serta keterbukaan. Keterbukaan yang terdapat pada digitalisasi pemerintahan ialah satu diantara bentuk pembaruan birokrasi di pada pemerintah. Pelaksanaan sektor publik di masa revolusi industri 4. 0 wajib mampu serta efisien dalam menyelesaikan berbagai masalah yang mungkin muncul serta mengoptimalkan rasa percaya masyarakat kepada kualitas layanan. Meraih pemerintahan yang baik ataupun good governance akan lebih mudah diraih lewat digitalisasi yang menjamin keterbukaan.

Penyelenggaraan KOMVAS dibantu dengan adanya Sistem Analisis Pelaporan Inovasi Daerah (SAPiDa). SAPiDa ialah sarana bagi Pemerintah Kota Banjarmasin guna menjangkau data Inovasi yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, baik itu oleh Perangkat Daerah, ASN, sampai dengan Masyarakat Umum. pada hal berikut, SAPiDa turut mendukung aktivitas KOMVAS Kota Banjarmasin Tahun 2024 yang selaku wadah apresiasi serta penilaian Inovasi tiap tahunnya.

SAPiDa Kota Banjarmasin mempunyai kesamaan dengan aplikasi Malang Data Inovasi (MADANI) milik Kota Malang. Berlandaskan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Rosyad, dkk (2023) aplikasi Malang Data Inovasi (MADANI) terbukti pada pengoptimalan Indeks Inovasi Daerah Kota Malang sebesar 4,63 poin dari tahun sebelumnya. Hal berikut memperlihatkan bahwasannya

aplikasi digital bisa membantu guna menjangkau inovasi.

KESIMPULAN

Implementasi Kompetisi Inovasi (KOMVAS) di Kota Banjarmasin telah dilakukan melalui berbagai upaya seperti penjangkauan inovasi, pelaporan lewat SAPIDa, pemberian penghargaan, serta pendampingan melalui *coaching clinic*. Berdasarkan teori Edward III dan Van Meter & Van Horn, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi yang aktif, sumber daya manusia yang tersedia, sikap positif pelaksana, serta koordinasi lintas sektor. KOMVAS juga melibatkan berbagai pihak eksternal seperti Kemendagri dan BRIN, dengan tujuan mendorong budaya inovasi di kalangan ASN, SKPD, akademisi, dan masyarakat.

Namun, pelaksanaan KOMVAS masih menghadapi beberapa tantangan. Faktor pendukung seperti sistem digital mempermudah proses administrasi dan memungkinkan proposal digunakan kembali untuk kompetisi nasional. Di sisi lain, belum terintegrasinya inovasi sebagai indikator kinerja, keterbatasan anggaran, rendahnya pemahaman peserta, serta minimnya regulasi penguat menjadi hambatan utama. Dukungan kepala daerah juga masih terbatas pada himbauan, belum didukung kebijakan yang mengikat di tiap SKPD, sehingga budaya inovasi belum sepenuhnya terbentuk.

REFERENCES

- Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
- Fatoni, A. (2022). A to Z Inovasi Daerah: Selalu Ada Ruang untuk Berinovasi. Bina Praja Press.
- Fauziah, W. E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan jalan lingkar selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Journal Publicuho*, 4(2), 672-691.
- Laary, Y., Tulus, F., & Dengo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(120).
- Septiana, Avid Rollick. (2020). Manajemen Inovasi : memenangi kompetisi, mengantisipasi disrupsi. Qnerza Publishing.
- Suryafma, Y., Haryadi, A. D., & Afni, Z. (2023). Penerapan Innovation Diffusion Theory terhadap Niat Mengadopsi Fintech Peer to Peer Lending. *Jurnal Akuntansi, Bisnis Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.30630/jabei.v2i1.50>
- Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service).
- Widodo. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in: *Administration and Society* Volume 6 No. 4 p. 445-485.